

Analisis Pengungkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Laporan Keberlanjutan Perusahaan pada Industri Kelapa Sawit Periode 2022–2024

Fitri Irianti* , Fatma Lestari

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: fitri.iriанти@office.ui.ac.id , fatma@ui.ac.id

Keywords:

OSH Disclosure Quality; Sustainability Report; Palm Oil Industry; GRI 403; POJK 51/2017.

Abstract

The palm oil industry is a sector with a high level of occupational safety and health (OHS) risks, so the quality of OHS disclosure in sustainability reports is a crucial aspect in supporting corporate transparency and accountability. This study aims to analyze the quality of OHS disclosure in palm oil companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and analyze the company characteristics and governance factors related to the quality of such disclosure. The study uses a quantitative approach with a content analysis method on sustainability reports, annual reports, and financial statements of 28 palm oil issuers during the 2022–2024 period. Disclosure quality is measured using an index developed based on GRI 403:2018 and POJK No. 51/POJK.03/2017. Data analysis was conducted using univariate, bivariate, and multivariate methods for the variables of company size, profitability, leverage, independence of the board of commissioners, institutional ownership, external assurance, and reporting framework. The results of the study show that the average quality of OHS disclosure reached 61.25, indicating a relatively adequate level of disclosure, although there is still quite wide variation between companies. OHS disclosure also tends to be dominated by information regarding policies, systems, and programs, while information reflecting the actual results of OHS implementation is still relatively limited. Multivariate analysis shows that the reporting framework, external assurance, and leverage are positively and significantly related to the quality of OHS disclosure, while company size, profitability, institutional ownership, and board independence do not show a significant relationship. These findings indicate that the quality of OHS disclosure is more influenced by factors related to reporting governance, information credibility, and external accountability than by economic characteristics or the formal governance structure of the company.

Kata Kunci:

Kualitas Pengungkapan K3; Laporan Keberlanjutan; Industri Kelapa Sawit; GRI 403; POJK 51/2017.

Abstrak

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor dengan tingkat risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang tinggi, sehingga kualitas pengungkapan K3 dalam laporan keberlanjutan menjadi aspek penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pengungkapan K3 pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menganalisis faktor-faktor karakteristik perusahaan dan tata kelola yang berhubungan dengan kualitas pengungkapan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode content analysis terhadap laporan keberlanjutan, laporan tahunan, dan laporan keuangan dari 28 emiten kelapa sawit selama periode 2022–2024. Kualitas pengungkapan diukur menggunakan indeks yang dikembangkan berdasarkan GRI 403:2018 dan POJK No. 51/POJK.03/2017. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat, dan multivariat terhadap variabel ukuran perusahaan, profitabilitas,

leverage, independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, external assurance, dan kerangka pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kualitas pengungkapan K3 mencapai 61,25, yang mengindikasikan tingkat pengungkapan yang relatif memadai, meskipun masih terdapat variasi yang cukup lebar antarperusahaan. Pengungkapan K3 juga cenderung didominasi oleh informasi mengenai kebijakan, sistem, dan program, sementara informasi yang merefleksikan hasil aktual pelaksanaan K3 masih relatif terbatas. Analisis multivariat menunjukkan bahwa kerangka pelaporan, external assurance, dan leverage berhubungan positif dan signifikan dengan kualitas pengungkapan K3, sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan independensi dewan komisaris tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pengungkapan K3 lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan tata kelola pelaporan, kredibilitas informasi, dan akuntabilitas eksternal dibandingkan karakteristik ekonomi maupun struktur tata kelola formal perusahaan.

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak hanya merupakan hak fundamental pekerja, tetapi juga indikator penting keberlanjutan operasional perusahaan dan stabilitas ekonomi global. *International Labour Organization* (ILO) melaporkan bahwa setiap tahun sekitar 2,78 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja dan penyakit terkait pekerjaan, dengan kerugian ekonomi mencapai 3,94% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global (ILO, 2019). Besarnya angka tersebut menegaskan bahwa risiko kerja masih dikelola secara belum optimal di berbagai sektor. Kegagalan dalam pengelolaan K3 tidak hanya berdampak pada keselamatan pekerja, tetapi juga menurunkan produktivitas serta mengancam keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang (Shahbaz & Sajjad, 2021). Dalam konteks ini, pengungkapan K3 dalam laporan keberlanjutan tidak lagi sekadar kewajiban pelaporan, melainkan instrumen strategis untuk menilai akuntabilitas dan kualitas pengelolaan risiko perusahaan (Mariappanadar et al., 2022).

Dalam konteks global tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam penerapan K3. Jumlah kecelakaan kerja meningkat dari sekitar 173 ribu kasus pada tahun 2018 menjadi 462.241 kasus pada tahun 2024 (Kemnaker, 2025), menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Tantangan ini semakin nyata pada industri kelapa sawit yang memiliki karakteristik risiko kerja tinggi. Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan kecelakaan kerja hingga 30% di wilayah sentra produksi pada tahun 2023 (BPJS Ketenagakerjaan, 2024). Di sisi lain, kualitas pengungkapan keberlanjutan di Indonesia masih belum konsisten, khususnya pada aspek sosial dan ketenagakerjaan yang relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya (Gunawan et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan praktik pelaporan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas informasi yang diungkapkan (Al-Shaer & Zaman, 2018).

Variasi kualitas pengungkapan K3 tidak dapat dilepaskan dari dinamika motivasi dan tekanan dalam pelaporan korporat. Teori pemangku kepentingan menempatkan pengungkapan sebagai bentuk akuntabilitas kepada berbagai pihak yang terdampak, terutama pekerja sebagai pemangku kepentingan utama (Freeman, 1984; Donaldson & Preston, 1995). Sementara itu, teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan sering digunakan sebagai sarana untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial (Suchman, 1995; Deegan, 2002). Di sisi lain, teori institusional menunjukkan bahwa praktik pelaporan cenderung mengikuti tekanan

regulasi dan norma industri, yang menghasilkan keseragaman formal tanpa selalu diikuti peningkatan kualitas substantif (DiMaggio & Powell, 1983). Dengan demikian, kualitas pengungkapan K3 dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara tekanan legitimasi, tuntutan pemangku kepentingan, dan dinamika institusional.

Secara global, Global Reporting Initiative (GRI 403:2018) telah menjadi standar utama dalam pelaporan K3 dengan pendekatan berbasis sistem manajemen. Namun, adopsi standar tersebut tidak secara otomatis menjamin kualitas pengungkapan, karena dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan tekanan institusional (Evangelinos et al., 2018; Alves & Conceição Ramos, 2022). Dalam konteks nasional, kewajiban pelaporan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 bertujuan meningkatkan transparansi dan keterbandingan informasi. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa regulasi mandatori sering kali hanya mendorong kepatuhan administratif tanpa diikuti peningkatan kualitas substansial (Cho & Patten, 2007; Arena et al., 2018). Hal ini menegaskan bahwa kewajiban pelaporan belum tentu berbanding lurus dengan kualitas transparansi yang dihasilkan.

Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan sektor strategis dengan kompleksitas risiko K3 yang tinggi. Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia dengan jutaan tenaga kerja, sektor ini berada di bawah tekanan global terkait praktik keberlanjutan, termasuk melalui regulasi seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) (European Commission, 2023). Risiko kerja yang dihadapi meliputi gangguan muskuloskeletal akibat pekerjaan manual, paparan bahan kimia, kebisingan, serta risiko kecelakaan fisik (Myzabella et al., 2019; Bhuanantanondh et al., 2021). Kompleksitas tersebut menuntut sistem pengelolaan K3 yang kuat sekaligus pengungkapan yang transparan dan berbasis data sebagai bentuk akuntabilitas.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan K3 dalam laporan keberlanjutan masih didominasi oleh pernyataan normatif dan simbolik yang tidak didukung oleh data yang memadai (Mariappanadar et al., 2022). Fenomena ini berkaitan dengan konsep decoupling, yaitu ketidaksesuaian antara praktik nyata dan struktur pelaporan (Meyer & Rowan, 1977), serta berpotensi mengarah pada praktik greenwashing (Testa et al., 2018). Akibatnya, laporan keberlanjutan berisiko tidak merepresentasikan kondisi K3 yang sesungguhnya, sehingga melemahkan fungsi akuntabilitasnya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan evaluasi yang sistematis dan terstandarisasi melalui analisis isi berbasis indikator. Pendekatan ini memungkinkan penilaian kualitas pengungkapan berdasarkan dimensi kelengkapan, relevansi, keandalan, dan keterbandingan (Hąbek & Wolniak, 2016), serta memberikan dasar evaluasi yang lebih objektif terhadap praktik pelaporan perusahaan.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui perspektif Institutional Theory, khususnya konsep normative isomorphism, yaitu kecenderungan organisasi untuk mengadopsi praktik-praktik yang dipandang sebagai standar profesional dan memperoleh legitimasi dalam lingkungannya. Dalam beberapa dekade terakhir, GRI telah berkembang menjadi salah satu kerangka pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan secara global. Penggunaan standar tersebut tidak hanya memberikan panduan teknis dalam penyusunan laporan, tetapi juga membentuk ekspektasi mengenai jenis dan kualitas informasi yang dianggap layak untuk diungkapkan kepada publik. Akibatnya, perusahaan yang mengadopsi GRI cenderung terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas dan lebih mendalam dibandingkan perusahaan yang berfokus pada pemenuhan persyaratan minimum pelaporan.

Tinjauan literatur menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam penelitian mengenai kualitas pengungkapan K3. Pertama, sebagian besar studi masih berfokus pada negara maju, sementara kajian di negara berkembang seperti Indonesia masih terbatas. Kedua, penelitian yang membandingkan efektivitas standar global dan regulasi nasional dalam konteks pengungkapan K3 masih minim. Ketiga, kajian yang secara spesifik menelaah industri kelapa sawit sebagai sektor berisiko tinggi masih sangat terbatas. Kesenjangan tersebut menunjukkan urgensi penelitian ini.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara kepatuhan administratif dan transparansi substantif dalam pengungkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada laporan keberlanjutan perusahaan kelapa sawit. Meskipun penyusunan laporan keberlanjutan telah diwajibkan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017, informasi K3 yang disajikan masih sering bersifat normatif dan lebih mencerminkan pemenuhan kewajiban pelaporan dibandingkan gambaran nyata mengenai pengelolaan risiko operasional. Selain itu, perbedaan penggunaan kerangka pelaporan, baik POJK, GRI, maupun kombinasi keduanya, berpotensi menimbulkan variasi kualitas informasi yang diungkapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan dan kualitas pengungkapan K3, membandingkan kualitas pengungkapan berdasarkan kerangka pelaporan yang digunakan, menilai tingkat transparansi substantif pengungkapan K3, serta menganalisis faktor-faktor perusahaan yang memengaruhi variasi kualitas pengungkapan tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian K3 sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas dan transparansi perusahaan, sekaligus menghasilkan kerangka evaluasi kualitas pengungkapan K3 yang mengintegrasikan standar GRI dan regulasi nasional. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan, membantu investor dan pemangku kepentingan dalam menilai kinerja ESG perusahaan, memberikan masukan bagi regulator dalam penyempurnaan kebijakan pelaporan keberlanjutan, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait kualitas pengungkapan keberlanjutan pada berbagai sektor industri maupun dalam konteks perbandingan lintas negara.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode content analysis untuk menilai kualitas pengungkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam laporan keberlanjutan perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan berupa laporan keberlanjutan, laporan tahunan, dan laporan keuangan periode 2022–2024. Penilaian pengungkapan K3 mengacu pada standar GRI 403:2018 dan POJK No. 51/POJK.03/2017. Selain itu, penelitian juga menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan K3.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian terdiri dari 31 perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di BEI. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan ketersediaan laporan dan kelengkapan informasi K3 selama periode 2022–2024. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, diperoleh 28 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan total 84 observasi (28 perusahaan × 3 tahun).

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan content analysis terhadap laporan keberlanjutan, laporan tahunan, dan laporan keuangan perusahaan. Data yang dianalisis meliputi pengungkapan K3, karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage), serta tata kelola perusahaan (independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan external assurance). Seluruh data diperoleh dari situs resmi BEI, perusahaan, OJK, dan GRI.

Analisis Data

Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan Microsoft Excel. Tahapan analisis meliputi analisis univariat untuk menggambarkan karakteristik data, analisis bivariat untuk melihat hubungan antarvariabel, dan analisis multivariat untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan serta tata kelola terhadap kualitas pengungkapan K3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Multivariat Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Pengungkapan K3

Analisis multivariat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas pengungkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) setelah pengaruh variabel lain dikendalikan secara simultan. Berbeda dengan analisis korelasi yang hanya menggambarkan hubungan antar dua variabel secara terpisah, analisis multivariat memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kontribusi relatif masing-masing faktor dalam menjelaskan variasi kualitas pengungkapan K3.

Pendekatan ini penting karena karakteristik perusahaan pada praktiknya tidak bekerja secara terpisah. Ukuran perusahaan, kondisi keuangan, struktur kepemilikan, tata kelola, mekanisme assurance, maupun kerangka pelaporan saling berinteraksi dalam membentuk keputusan perusahaan mengenai informasi apa yang akan diungkapkan dan seberapa rinci informasi tersebut disajikan. Oleh karena itu, analisis multivariat diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai faktor-faktor yang secara independen berhubungan dengan kualitas pengungkapan K3.

1. Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model dievaluasi untuk menilai sejauh mana variabel-variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variasi kualitas pengungkapan K3. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Kelayakan Model

Ukuran	Nilai
R^2	0,561
<i>Adjusted R²</i>	0,521
<i>F-statistic</i>	13,87
<i>Significance F</i>	<0,001

Sumber: hasil pengolahan data penelitian (2026)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki tingkat kelayakan yang baik. Nilai signifikansi uji F yang lebih kecil dari 0,001 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang dimasukkan ke dalam model secara simultan berhubungan signifikan dengan kualitas pengungkapan K3. Dengan demikian, model yang dibangun

memiliki kemampuan yang memadai untuk menjelaskan variasi kualitas pengungkapan K3 pada perusahaan kelapa sawit yang menjadi objek penelitian.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,561 menunjukkan bahwa 56,1% variasi kualitas pengungkapan K3 dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, external assurance, dan kerangka pelaporan. Setelah memperhitungkan jumlah variabel dalam model, nilai Adjusted R^2 sebesar 0,521 mengindikasikan bahwa sekitar 52,1% variasi kualitas pengungkapan K3 masih dapat dijelaskan oleh model penelitian.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh variasi kualitas pengungkapan K3 dapat dipahami melalui karakteristik perusahaan yang dianalisis dalam penelitian ini. Sementara itu, sisanya sebesar 47,9% kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model, seperti budaya organisasi, komitmen manajemen terhadap keberlanjutan, tekanan dari pemangku kepentingan, karakteristik kepemimpinan, maupun faktor institusional lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan K3 merupakan fenomena yang kompleks dan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan hanya melalui karakteristik perusahaan yang bersifat struktural.

2. Hasil Pengujian Proposisi

Hasil estimasi regresi digunakan untuk menguji hubungan antara masing-masing variabel independen dan kualitas pengungkapan K3 setelah pengaruh variabel lainnya dikendalikan secara simultan. Ringkasan hasil pengujian proposisi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Pengujian (Regresi Berganda)

Kode	Variabel	Koefisien (β)	p-value	Keputusan
P1	<i>SIZE</i>	3,234	0,103	Ditolak
P2	<i>ROA</i>	0,026	0,933	Ditolak
P3	<i>DAR</i>	0,149	0,003	Diterima
P4	<i>IND</i>	0,356	0,099	Ditolak
P5	<i>INST</i>	0,122	0,166	Ditolak
P6	<i>ASSUR</i>	23,013	0,002	Diterima
P7	<i>FRAMEWORK</i>	24,705	<0,001	Diterima

Keterangan: signifikan pada $\alpha = 5\%$.

Sumber: hasil pengolahan data penelitian (2026)

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa dari tujuh proposisi yang diajukan, terdapat tiga variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan kualitas pengungkapan K3 pada tingkat signifikansi 5%, yaitu leverage (*DAR*), external assurance (*ASSUR*), dan kerangka pelaporan (*FRAMEWORK*). Ketiga variabel tersebut memiliki arah hubungan positif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan nilai atau keberadaan faktor-faktor tersebut berkaitan dengan peningkatan kualitas pengungkapan K3.

Di antara seluruh variabel yang dianalisis, kerangka pelaporan merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling dominan dengan koefisien sebesar 24,705. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan standar Global Reporting Initiative (GRI) ke dalam laporan keberlanjutannya memiliki skor kualitas pengungkapan K3 yang rata-rata sekitar 24,7 poin lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang hanya menggunakan kerangka POJK, setelah pengaruh variabel lain dikendalikan dalam model. Besarnya pengaruh tersebut menegaskan bahwa kerangka pelaporan bukan sekadar perangkat

teknis dalam penyusunan laporan, melainkan instrumen yang berperan penting dalam membentuk keluasan, kedalaman, dan kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa kualitas pengungkapan K3 sangat dipengaruhi oleh standar pelaporan yang menjadi acuan perusahaan. Kerangka pelaporan yang lebih rinci dan terstruktur menyediakan pedoman yang lebih jelas mengenai jenis informasi yang perlu diungkapkan, sehingga mendorong penyajian informasi yang lebih lengkap, sistematis, dan dapat diperbandingkan. Dalam konteks tersebut, adopsi GRI dapat dipandang sebagai mekanisme yang memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaporan K3.

External assurance juga menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan kualitas pengungkapan K3, dengan nilai koefisien sebesar 23,013. Besarnya koefisien tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang melibatkan pihak independen dalam proses verifikasi laporan cenderung menghasilkan kualitas pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan assurance eksternal. Keterlibatan pihak ketiga dalam proses assurance tidak hanya meningkatkan tingkat kredibilitas informasi yang dipublikasikan, tetapi juga mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi yang lebih konsisten, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Sementara itu, leverage merupakan variabel lain yang terbukti berhubungan signifikan dengan kualitas pengungkapan K3. Menariknya, hasil ini berbeda dengan temuan pada analisis korelasi yang menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara leverage dan kualitas pengungkapan K3. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh leverage baru terlihat setelah pengaruh variabel lain dikendalikan secara simultan dalam model regresi. Secara substantif, kondisi ini dapat merefleksikan kecenderungan perusahaan dengan tingkat ketergantungan pendanaan yang lebih tinggi untuk meningkatkan transparansi sebagai bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan kreditur, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks tersebut, pengungkapan K3 dapat dipahami sebagai salah satu bentuk komunikasi perusahaan dalam menunjukkan kemampuan pengelolaan risiko operasional dan keberlanjutan bisnis.

Di sisi lain, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kualitas pengungkapan K3. Hasil ini mengindikasikan bahwa besarnya aset perusahaan, kemampuan menghasilkan laba, maupun tingginya proporsi kepemilikan institusional tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kualitas pengungkapan K3 setelah faktor-faktor lain diperhitungkan secara bersamaan dalam model.

Variabel independensi dewan komisaris menunjukkan hubungan positif dengan tingkat signifikansi yang berada pada batas marginal ($p = 0,099$). Meskipun belum memenuhi kriteria signifikansi pada tingkat 5%, arah hubungan yang positif memberikan indikasi bahwa keberadaan komisaris independen berpotensi mendukung peningkatan kualitas pengungkapan K3. Namun demikian, bukti empiris yang diperoleh dalam penelitian ini belum cukup kuat untuk menyimpulkan adanya hubungan yang signifikan pada tingkat keyakinan yang digunakan.

Secara keseluruhan, hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan tata kelola pelaporan dan mekanisme akuntabilitas perusahaan memiliki

peran yang lebih menonjol dibandingkan karakteristik ekonomi perusahaan dalam menjelaskan variasi kualitas pengungkapan K3. Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi K3 tidak semata-mata ditentukan oleh kapasitas finansial atau skala perusahaan, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh komitmen institusional perusahaan dalam membangun sistem pelaporan yang kredibel, terverifikasi, dan berorientasi pada akuntabilitas. Dalam perspektif yang lebih luas, kualitas pengungkapan K3 pada akhirnya bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar pelaporan, tetapi juga mencerminkan kesediaan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan upaya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja yang menjadi bagian paling fundamental dari proses operasional perusahaan.

Interpretasi Kualitas Pengungkapan K3 pada Industri Kelapa Sawit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berada pada tingkat yang relatif moderat hingga tinggi. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata Indeks Pengungkapan K3 (K3DI) sebesar 61,25, dengan mayoritas observasi berada pada kategori Substantive Partial dan Substantive Comprehensive. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan tidak lagi terbatas pada pemenuhan kewajiban pelaporan minimum, melainkan telah mulai mengungkapkan informasi K3 secara lebih luas dan terstruktur.

Meskipun demikian, capaian tersebut tidak dapat diartikan sebagai adanya tingkat kualitas pelaporan yang seragam di seluruh perusahaan. Variasi skor yang cukup lebar menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan K3 masih sangat beragam antarperusahaan. Pada satu sisi terdapat perusahaan yang telah menyajikan informasi secara komprehensif dengan cakupan yang mendekati seluruh indikator yang diukur, sementara pada sisi lain masih ditemukan perusahaan yang hanya mengungkapkan informasi secara terbatas. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa proses institusionalisasi praktik pelaporan K3 belum berlangsung secara merata dalam industri kelapa sawit.

Dari perspektif Institutional Theory, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun perusahaan beroperasi dalam lingkungan regulasi yang relatif sama, tingkat internalisasi terhadap norma dan praktik pelaporan keberlanjutan dapat berbeda secara substansial. Regulasi mampu menciptakan keseragaman dalam kewajiban pelaporan, namun tidak secara otomatis menghasilkan keseragaman dalam kualitas informasi yang diungkapkan. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan belum tentu diikuti oleh tingkat transparansi yang setara.

Temuan lain yang menarik adalah kecenderungan perusahaan untuk lebih banyak mengungkapkan leading indicators dibandingkan lagging indicators. Informasi mengenai sistem manajemen K3, identifikasi bahaya, pelatihan, konsultasi pekerja, serta berbagai mekanisme pencegahan risiko cenderung lebih banyak disampaikan dibandingkan informasi mengenai hasil aktual seperti angka kecelakaan kerja, cedera akibat kerja, maupun penyakit akibat kerja. Pola ini menunjukkan bahwa perusahaan relatif lebih nyaman mengomunikasikan aspek yang menggambarkan komitmen dan kapasitas organisasi dalam mengelola risiko dibandingkan hasil nyata dari implementasi sistem tersebut.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui perspektif Decoupling Theory yang dikemukakan oleh Meyer dan Rowan (1977). Teori ini menjelaskan bahwa organisasi dapat mengadopsi struktur formal, kebijakan, dan praktik yang dianggap legitim oleh lingkungan

institusional tanpa selalu diikuti oleh tingkat keterbukaan yang sama terhadap hasil implementasinya. Dalam konteks penelitian ini, perusahaan tampak lebih aktif mengungkapkan keberadaan sistem, kebijakan, dan prosedur K3 dibandingkan indikator hasil yang secara langsung merefleksikan efektivitas penerapan sistem tersebut.

Interpretasi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk menyembunyikan informasi. Sebaliknya, kondisi tersebut lebih merefleksikan dinamika umum dalam praktik pelaporan keberlanjutan, di mana organisasi cenderung memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek yang dapat menunjukkan kesiapan, komitmen, dan kesesuaian dengan ekspektasi pemangku kepentingan. Namun demikian, ketidakseimbangan antara pengungkapan aspek proses dan aspek hasil berpotensi menghasilkan gambaran yang kurang utuh mengenai kondisi K3 yang sesungguhnya.

Dalam konteks industri kelapa sawit, isu ini memiliki relevansi yang sangat tinggi. Karakteristik operasional sektor kelapa sawit melibatkan berbagai aktivitas yang memiliki tingkat risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang signifikan, mulai dari kegiatan budidaya, pemanenan, pengangkutan hasil panen, hingga pengolahan di pabrik. Oleh karena itu, kualitas pengungkapan K3 tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar pelaporan keberlanjutan, tetapi juga mencerminkan tingkat akuntabilitas perusahaan dalam mengomunikasikan bagaimana risiko-risiko tersebut dikelola dan bagaimana perlindungan terhadap pekerja dilaksanakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengungkapan K3 pada perusahaan kelapa sawit Indonesia telah mengalami perkembangan ke arah yang lebih substantif. Namun demikian, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas pelaporan, khususnya dalam memperkuat keseimbangan antara pengungkapan kebijakan, proses, dan hasil kinerja K3. Dengan demikian, tantangan utama pelaporan K3 saat ini bukan lagi sekadar memastikan bahwa perusahaan melaporkan informasi K3, melainkan memastikan bahwa informasi yang diungkapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, kredibel, dan relevan mengenai kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang dialami para pekerja dalam praktik operasional sehari-hari.

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Pengungkapan K3

Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa tidak seluruh karakteristik perusahaan memiliki hubungan yang sama terhadap kualitas pengungkapan K3. Dari tujuh variabel yang diuji, hanya tiga variabel yang terbukti berhubungan secara signifikan, yaitu kerangka pelaporan, external assurance, dan leverage. Ketiga variabel tersebut memiliki arah hubungan positif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan K3 lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan tata kelola pelaporan dan mekanisme akuntabilitas dibandingkan karakteristik ekonomi perusahaan semata.

Temuan ini memberikan indikasi bahwa kualitas pengungkapan K3 pada industri kelapa sawit tidak terutama ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki perusahaan, tetapi oleh sejauh mana perusahaan mengadopsi praktik pelaporan yang mendorong transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas informasi. Pola tersebut sejalan dengan perkembangan pelaporan keberlanjutan global yang semakin menempatkan standar pelaporan dan mekanisme verifikasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas informasi non-keuangan.

1. Kerangka Pelaporan dan Kualitas Pengungkapan K3

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka pelaporan merupakan faktor yang memiliki hubungan paling kuat dengan kualitas pengungkapan K3 dibandingkan variabel lain yang dianalisis dalam penelitian ini. Signifikansi hubungan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan standar Global Reporting Initiative (GRI) ke dalam laporan keberlanjutannya cenderung menghasilkan kualitas pengungkapan K3 yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang hanya mengacu pada ketentuan POJK. Temuan ini mengisyaratkan bahwa perbedaan kualitas pengungkapan tidak semata-mata ditentukan oleh karakteristik internal perusahaan, tetapi juga oleh standar dan pedoman yang digunakan dalam proses pelaporan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kerangka pelaporan berperan sebagai faktor yang membentuk cara perusahaan mengidentifikasi, mengelola, dan mengomunikasikan informasi K3 kepada para pemangku kepentingan. Dibandingkan ketentuan pelaporan yang bersifat lebih umum, standar GRI menyediakan indikator yang lebih spesifik dan terstruktur mengenai berbagai aspek K3, mulai dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, identifikasi bahaya dan penilaian risiko, keterlibatan pekerja, program pelatihan, hingga indikator hasil seperti kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kejelasan indikator tersebut mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi secara lebih sistematis, terukur, dan komprehensif.

Dari perspektif Institutional Theory, hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui konsep normative isomorphism, yaitu kecenderungan organisasi untuk mengadopsi praktik-praktik yang dipandang sebagai standar profesional dan memperoleh legitimasi dalam lingkungannya. Dalam beberapa dekade terakhir, GRI telah berkembang menjadi salah satu kerangka pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan secara global. Penggunaan standar tersebut tidak hanya memberikan panduan teknis dalam penyusunan laporan, tetapi juga membentuk ekspektasi mengenai jenis dan kualitas informasi yang dianggap layak untuk diungkapkan kepada publik.

Dalam konteks tersebut, adopsi GRI dapat dipahami sebagai respons perusahaan terhadap berkembangnya norma transparansi dan akuntabilitas keberlanjutan. Tekanan tersebut tidak selalu berasal dari regulasi formal, melainkan juga muncul melalui ekspektasi investor, lembaga pembiayaan, pelanggan, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai kelompok pemangku kepentingan lainnya yang semakin menaruh perhatian pada kinerja keberlanjutan perusahaan. Akibatnya, perusahaan yang mengadopsi GRI cenderung terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas dan lebih mendalam dibandingkan perusahaan yang berfokus pada pemenuhan persyaratan minimum pelaporan.

Temuan ini juga memperkuat argumentasi bahwa kualitas pengungkapan keberlanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas standar yang digunakan sebagai acuan. Standar pelaporan yang lebih rinci tidak hanya meningkatkan keseragaman informasi yang diungkapkan, tetapi juga mengurangi ruang bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara selektif. Dengan kata lain, keberadaan kerangka pelaporan yang komprehensif berfungsi sebagai mekanisme yang mendorong konsistensi dan keterbandingan informasi antarperusahaan.

Bagi industri kelapa sawit, implikasi temuan ini menjadi sangat relevan mengingat sektor ini menghadapi tingkat perhatian yang tinggi terkait isu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang melekat pada aktivitas operasional perkebunan dan pengolahan kelapa sawit menjadikan transparansi informasi K3 sebagai aspek

yang semakin penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Dalam situasi tersebut, penggunaan kerangka pelaporan yang lebih komprehensif dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas perusahaan dalam mengomunikasikan bagaimana risiko-risiko tersebut dikelola.

Lebih jauh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan K3 merupakan area yang relatif dapat diintervensi melalui kebijakan organisasi. Berbeda dengan karakteristik perusahaan seperti ukuran atau profitabilitas yang cenderung berkembang secara gradual, keputusan untuk mengadopsi standar pelaporan yang lebih komprehensif merupakan keputusan strategis yang dapat diambil oleh manajemen dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat. Oleh karena itu, penguatan adopsi standar pelaporan yang lebih rinci berpotensi menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas transparansi K3 di sektor kelapa sawit.

Pada akhirnya, nilai utama dari suatu kerangka pelaporan tidak terletak pada keberadaan standar tersebut sebagai dokumen formal, melainkan pada kemampuannya mendorong penyediaan informasi yang relevan, dapat diverifikasi, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Dalam konteks K3, kualitas pengungkapan yang lebih baik memungkinkan pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana perusahaan mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelaporan K3 tidak hanya berkontribusi pada transparansi korporasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas perusahaan terhadap pekerja yang setiap hari berhadapan langsung dengan berbagai risiko operasional di lingkungan kerja.

2. External Assurance dan Kualitas Pengungkapan K3

Hasil penelitian menunjukkan bahwa external assurance memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kualitas pengungkapan K3. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang melibatkan pihak independen dalam proses verifikasi laporan keberlanjutan cenderung menghasilkan pengungkapan K3 yang lebih komprehensif dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan assurance eksternal. Dengan demikian, kualitas pengungkapan K3 tidak hanya ditentukan oleh jenis informasi yang disampaikan, tetapi juga oleh mekanisme yang digunakan untuk memastikan kredibilitas dan keandalan informasi tersebut.

Secara substantif, keberadaan assurance eksternal dapat dipahami sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas proses pelaporan keberlanjutan. Keterlibatan pihak independen dalam melakukan penelaahan terhadap laporan mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi yang lebih terdokumentasi, konsisten, dan didukung oleh bukti yang memadai. Dalam konteks tersebut, assurance tidak hanya berfungsi sebagai proses verifikasi, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pelaporan serta peningkatan kualitas informasi yang dihasilkan.

Temuan ini sejalan dengan perspektif Legitimacy Theory yang menjelaskan bahwa perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial melalui berbagai mekanisme yang menunjukkan kesesuaian antara aktivitas perusahaan dan ekspektasi masyarakat. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, penggunaan assurance eksternal dapat dipandang sebagai salah satu bentuk upaya perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi yang dipublikasikan. Keterlibatan pihak independen memberikan keyakinan tambahan bahwa informasi yang disampaikan tidak

semata-mata merupakan representasi kepentingan manajemen, melainkan telah melalui proses penelaahan yang objektif dan sistematis.

Hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui Signalling Theory. Dalam situasi ketika pengguna laporan menghadapi keterbatasan informasi mengenai kondisi internal perusahaan, penggunaan assurance eksternal dapat berfungsi sebagai sinyal mengenai komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ketersediaan perusahaan untuk membuka laporan keberlanjutannya kepada pihak independen menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada publik. Dengan demikian, assurance eksternal tidak hanya memperkuat kualitas informasi, tetapi juga membantu mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Dalam konteks pengungkapan K3, keberadaan assurance memiliki relevansi yang sangat penting karena sebagian besar informasi yang diungkapkan bersifat non-keuangan dan tidak mudah diverifikasi secara langsung oleh pengguna laporan. Informasi mengenai sistem manajemen K3, identifikasi bahaya, program pelatihan, pelibatan pekerja dalam pengelolaan keselamatan kerja, maupun data kecelakaan dan penyakit akibat kerja memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi agar dapat digunakan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, assurance eksternal berpotensi memperkuat reliabilitas informasi yang disampaikan sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keberlanjutan.

Proporsi perusahaan yang menggunakan external assurance dalam penelitian ini relatif rendah, sebagaimana ditunjukkan pada hasil analisis deskriptif sebelumnya. Namun demikian, hasil regresi menunjukkan bahwa keberadaan assurance memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas pengungkapan K3. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun tingkat adopsinya masih terbatas, assurance eksternal berpotensi menjadi salah satu mekanisme yang efektif dalam meningkatkan kualitas, konsistensi, dan kredibilitas informasi keberlanjutan yang diungkapkan perusahaan.

Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pengungkapan K3 tidak hanya bergantung pada penyusunan standar pelaporan yang lebih baik, tetapi juga pada penguatan mekanisme verifikasi yang mampu meningkatkan kepercayaan terhadap informasi yang disajikan. Pelaporan yang berkualitas memerlukan lebih dari sekadar kelengkapan informasi; pelaporan tersebut juga harus mampu memberikan keyakinan bahwa informasi yang diungkapkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, kualitas pengungkapan K3 memiliki makna yang melampaui kepentingan pelaporan korporasi semata. Informasi yang kredibel mengenai pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari akuntabilitas perusahaan terhadap berbagai pihak yang terdampak oleh aktivitas operasionalnya. Dalam industri kelapa sawit yang memiliki tingkat risiko kerja relatif tinggi, transparansi yang didukung oleh assurance eksternal dapat berkontribusi pada tersedianya informasi yang lebih dapat dipercaya mengenai bagaimana perusahaan mengelola risiko serta melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya.

3. Leverage dan Kualitas Pengungkapan K3

Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kualitas pengungkapan K3. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat ketergantungan yang lebih tinggi terhadap sumber pendanaan eksternal cenderung

memiliki kualitas pengungkapan K3 yang lebih baik dibandingkan perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih rendah.

Hubungan tersebut memberikan perspektif yang penting mengingat pada tahap analisis korelasi leverage tidak menunjukkan keterkaitan yang berarti dengan kualitas pengungkapan K3. Signifikansi yang muncul pada model multivariat mengindikasikan bahwa pengaruh leverage baru terlihat setelah pengaruh variabel lain dikendalikan secara simultan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara leverage dan kualitas pengungkapan K3 tidak dapat dipahami secara terpisah dari karakteristik perusahaan lainnya.

Dari perspektif Agency Theory, temuan ini dapat dijelaskan melalui kebutuhan perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan penyedia dana. Perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih tinggi umumnya menghadapi tuntutan akuntabilitas yang lebih besar dari kreditur dan lembaga pembiayaan karena sebagian aktivitas operasionalnya didukung oleh sumber pendanaan eksternal. Dalam situasi tersebut, perusahaan memiliki insentif untuk menyediakan informasi yang lebih luas dan lebih kredibel guna meningkatkan kepercayaan serta mengurangi ketidakpastian yang dihadapi para penyedia modal.

Penjelasan serupa juga dapat ditemukan dalam Stakeholder Theory. Kreditur merupakan salah satu kelompok pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan operasional perusahaan. Dalam industri kelapa sawit yang memiliki tingkat risiko operasional relatif tinggi, informasi mengenai pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi bagian penting dalam menilai kemampuan perusahaan mengelola risiko. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih tinggi dapat terdorong untuk mengungkapkan informasi K3 secara lebih komprehensif sebagai bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan pihak pemberi pinjaman.

Dalam konteks industri kelapa sawit, hubungan tersebut memiliki relevansi yang kuat. Aktivitas operasional pada sektor ini melibatkan berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha, termasuk risiko kecelakaan kerja, gangguan kesehatan akibat kerja, serta berbagai risiko operasional lainnya yang dapat berdampak terhadap produktivitas dan stabilitas perusahaan. Bagi kreditur, kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko-risiko tersebut merupakan informasi yang relevan karena berkaitan dengan kesinambungan operasional dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansialnya.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengungkapan K3 tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi komunikasi perusahaan kepada pihak eksternal yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap keberlangsungan usaha. Informasi mengenai sistem pengelolaan K3, program pencegahan risiko, maupun kinerja keselamatan kerja dapat berfungsi sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko operasional secara keseluruhan.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa tekanan dari pihak eksternal, termasuk kreditur dan penyedia modal, dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi non-keuangan. Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara leverage dan kualitas pengungkapan K3 tidak selalu bersifat langsung. Pengaruh leverage baru tampak setelah karakteristik perusahaan lainnya dianalisis secara bersamaan, yang menunjukkan bahwa kualitas

pengungkapan K3 merupakan hasil interaksi berbagai faktor organisasi, tata kelola, dan lingkungan institusional.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa transparansi K3 dapat berkembang bukan hanya karena adanya tuntutan regulasi atau komitmen keberlanjutan perusahaan, tetapi juga karena kebutuhan untuk mempertahankan kepercayaan pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas operasional perusahaan. Dalam industri kelapa sawit yang memiliki karakteristik risiko kerja relatif tinggi, pengungkapan K3 yang lebih baik berkontribusi pada tersedianya informasi yang lebih memadai mengenai pengelolaan risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Kondisi tersebut memperkuat fungsi pelaporan keberlanjutan sebagai sarana akuntabilitas sekaligus sebagai media komunikasi perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan mengenai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.

Sintesis Teoritis dan Implikasi Temuan

Jika keseluruhan temuan penelitian dipandang secara terintegrasi, terlihat bahwa kualitas pengungkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan kelapa sawit lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan kredibilitas dan tata kelola pelaporan dibandingkan karakteristik ekonomi maupun struktur tata kelola formal perusahaan. Pola ini tercermin dari signifikannya pengaruh kerangka pelaporan, external assurance, dan leverage, sementara ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, serta independensi dewan komisaris tidak menunjukkan hubungan yang bermakna secara statistik.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pengungkapan K3 tidak semata-mata merupakan konsekuensi dari besarnya sumber daya yang dimiliki perusahaan atau kuatnya struktur tata kelola yang dibangun secara formal. Sebaliknya, kualitas pengungkapan tampaknya lebih ditentukan oleh mekanisme yang secara langsung memengaruhi bagaimana informasi disusun, distandardisasi, diverifikasi, dan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, transparansi K3 tidak hanya berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk melaporkan, tetapi juga dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari perspektif Institutional Theory, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik pengungkapan K3 berkembang dalam kerangka norma dan ekspektasi yang semakin terinstitusionalisasi. Pengaruh kuat kerangka pelaporan menunjukkan bahwa standar pelaporan berperan penting dalam membentuk kualitas informasi yang dihasilkan perusahaan. Standar yang lebih komprehensif tidak hanya menyediakan pedoman teknis mengenai apa yang perlu diungkapkan, tetapi juga membentuk pemahaman mengenai informasi apa yang dianggap relevan dan layak diketahui oleh publik. Dalam konteks ini, kualitas pengungkapan K3 dapat dipahami sebagai hasil dari proses penyesuaian perusahaan terhadap norma transparansi yang berkembang di lingkungan institusionalnya.

Pada saat yang sama, signifikansi external assurance menunjukkan bahwa kualitas pelaporan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan informasi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap informasi tersebut. Keberadaan assurance memperkuat argumen bahwa akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan tidak cukup dibangun melalui pengungkapan semata, tetapi juga memerlukan mekanisme yang mampu meningkatkan reliabilitas dan kredibilitas informasi yang disampaikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas

pengungkapan K3 tidak hanya berkaitan dengan kuantitas informasi yang tersedia, tetapi juga dengan sejauh mana informasi tersebut dapat dipercaya oleh pengguna laporan.

Sementara itu, hubungan positif antara leverage dan kualitas pengungkapan K3 menunjukkan bahwa kebutuhan perusahaan untuk mempertahankan kepercayaan pihak eksternal dapat menjadi pendorong penting bagi peningkatan transparansi. Dalam konteks ini, pengungkapan K3 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas sosial, tetapi juga sebagai sarana komunikasi yang membantu perusahaan menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola risiko operasional. Risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang dikelola dengan baik pada akhirnya tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga berhubungan dengan keberlangsungan operasional dan stabilitas organisasi secara keseluruhan.

Sebaliknya, tidak ditemukannya hubungan yang signifikan pada ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan independensi dewan komisaris memberikan indikasi bahwa karakteristik perusahaan yang selama ini sering diposisikan sebagai determinan utama pengungkapan keberlanjutan belum tentu memiliki pengaruh yang sama pada seluruh konteks industri. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kualitas pengungkapan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor organisasi, regulasi, dan lingkungan institusional, sehingga tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu pendekatan teoritis atau satu kelompok variabel tertentu.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pengungkapan K3 perlu diarahkan pada penguatan instrumen yang secara langsung memengaruhi kualitas pelaporan. Peningkatan penggunaan standar pelaporan yang lebih komprehensif, perluasan praktik external assurance, serta penguatan mekanisme akuntabilitas informasi berpotensi memberikan dampak yang lebih nyata dibandingkan mengandalkan karakteristik perusahaan yang bersifat struktural. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan K3 merupakan sesuatu yang dapat diintervensi melalui kebijakan dan praktik organisasi, tanpa harus bergantung pada perubahan ukuran perusahaan atau kondisi keuangan tertentu.

Dalam konteks yang lebih luas, kualitas pengungkapan K3 tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pelaporan keberlanjutan. Informasi yang disajikan dalam laporan pada dasarnya merepresentasikan bagaimana perusahaan mengelola risiko yang dihadapi tenaga kerja dalam aktivitas operasional sehari-hari. Oleh karena itu, transparansi K3 memiliki makna yang melampaui fungsi komunikasi korporasi semata. Transparansi tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas perusahaan dalam menunjukkan bagaimana upaya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kualitas pengungkapan K3 pada industri kelapa sawit lebih dekat dengan isu kredibilitas pelaporan dan akuntabilitas institusional dibandingkan dengan isu kapasitas ekonomi perusahaan. Pemahaman tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur pengungkapan keberlanjutan sekaligus menegaskan pentingnya penguatan sistem pelaporan yang mampu menghasilkan informasi yang tidak hanya lengkap, tetapi juga relevan, andal, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan berbagai pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pengungkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024 secara umum menunjukkan tingkat yang cukup baik, meskipun masih terdapat perbedaan antarperusahaan dan pengungkapan lebih banyak berfokus pada aspek kebijakan serta sistem pengelolaan risiko dibandingkan kinerja aktual K3. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang mengadopsi kerangka pelaporan POJK dan GRI memiliki kualitas pengungkapan yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang hanya menggunakan POJK, sementara kerangka pelaporan, external assurance, dan leverage terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan K3. Sebaliknya, ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan meningkatkan transparansi melalui pengungkapan indikator kinerja K3 yang lebih komprehensif dan penggunaan external assurance, sedangkan regulator perlu memperkuat standar pelaporan K3. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian, menambahkan variabel lain yang relevan, serta mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualitas pengungkapan dan kinerja K3 perusahaan.

REFERENSI

- Al-Shaer, H., & Zaman, M. (2018). Credibility of sustainability reports: The contribution of audit committees. *Business Strategy and the Environment*, 27(7), 973–986.
- Alves, C., & Conceição Ramos, M. (2022). Occupational health and safety: Quality and determinants of its disclosure in sustainability reporting. *Revista de Administração de Empresas*, 62(5), e2021-0101. <https://doi.org/10.1590/S0034-759020220503x>.
- Aouadi, A., & Marsat, S. (2018). Do ESG controversies matter for firm value? Evidence from international data. *Journal of Business Ethics*, 151(4), 1027–1047. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3213-8>.
- Arena, M., Azzone, G., & Mapelli, F. (2018). What drives the evolution of corporate social responsibility strategies? An institutional logics perspective. *Journal of Cleaner Production*, 171, 345–355. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.245>.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (2024). BPJS Ketenagakerjaan gelar ToT K3 untuk tekan kecelakaan di perkebunan sawit [Siaran pers resmi]. BPJS Ketenagakerjaan. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/29100/BPJS-Ketenagakerjaan-Gelar-ToT-K3-untuk-Tekan-Kecelakaan-di-Perkebunan-Sawit>.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (2024). Kecelakaan kerja makin marak dalam lima tahun terakhir [Siaran pers resmi]. BPJS Ketenagakerjaan. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/Kecelakaan-Kerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik kelapa sawit Indonesia 2023. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/en/publication/2024/11/29/d5dcb42ab730df1be4339c34/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2023.html>.
- Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>.
- Bebbington, J., Brown, J., & Frame, B. (2007). Accounting technologies and sustainability assessment models. *Ecological Economics*, 61(2–3), 224–236. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.10.021>.

- Bhuanantanondh, P., Buchholz, B., Arphorn, S., Kongtip, P., & Woskie, S. (2021). The prevalence of and risk factors associated with musculoskeletal disorders in Thai oil palm harvesting workers: A cross-sectional study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(10), 5474. <https://doi.org/10.3390/ijerph18105474>.
- Boiral, O. (2013). Sustainability reports as simulacra? A counter-account of A and A+ GRI reports. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(7), 1036–1071. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2013-1299>.
- Brown, H. S., de Jong, M., & Levy, D. L. (2009). Building institutions based on information disclosure: Lessons from GRI's sustainability reporting. *Journal of Cleaner Production*, 17(6), 571–580. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.12.009>.
- Brunsson, N. (1989). *The organization of hypocrisy: Talk, decisions and actions in organizations*. Wiley.
- Cho, C. H., & Patten, D. M. (2007). The role of environmental disclosures as tools of legitimacy: A research note. *Accounting, Organizations and Society*, 32(7-8), 639-647. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2006.09.009>.
- Clarkson, M. B. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. *Academy of Management Review*, 20(1), 92–117. <https://doi.org/10.2307/258888>.
- Clatworthy, M., & Jones, M. J. (2003). Financial reporting of good news and bad news: Evidence from accounting narratives. *Accounting and Business Research*, 33(3), 171–185. <https://doi.org/10.1080/00014788.2003.9729645>.
- Cyert, R. M., & March, J. G. (1963). *A behavioral theory of the firm*. Prentice-Hall.
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282-311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>.
- Dienes, D., Sassen, R., & Fischer, J. (2016). What are the drivers of sustainability reporting? A systematic review. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 7(2), 154–189. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2014-0050>.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147-160. <https://doi.org/10.2307/2095101>.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65-91. <https://doi.org/10.2307/258887>.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone.
- European Agency for Safety and Health at Work [EU-OSHA]. (2017). An international comparison of the cost of work-related accidents and illnesses. Publications Office of the European Union. <https://osha.europa.eu/en/publications/international-comparison-cost-work-related-accidents-and-illnesses>
- Eccles, R. G., & Serafeim, G. (2013). The performance frontier: Innovating for a sustainable strategy. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2013/05/the-performance-frontier-innovating-for-a-sustainable-strategy>.
- European Commission. (2023). Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation

- (EUDR). Publications Office of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1115>.
- Evangelinos, K., Fotiadis, S., Skouloudis, A., Khan, N., Konstandakopoulou, F., Nikolaou, I., & Lundy, S. (2018). Occupational health and safety disclosures in sustainability reports: An overview of trends among corporate leaders. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 25(5), 961–970. <https://doi.org/10.1002/csr.1512>.
- Fombrun, C. J., & van Riel, C. B. M. (2004). *Fame and fortune: How successful companies build winning reputations*. FT Prentice Hall.
- Fonseca, L., & Carvalho, F. (2019). The reporting of SDGs by quality, environmental, and occupational health and safety-certified organizations. *Sustainability*, 11(20), Article 5797. <https://doi.org/10.3390/su11205797>.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139192675>.
- Fung, A., Graham, M., & Weil, D. (2007). *Full disclosure: The perils and promise of transparency*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9780521699617>.
- GAPKI. (2025, January 13). Indonesia berupaya tingkatkan produksi sawit di 2025. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. <https://gapki.id/news/2025/01/13/indonesia-berupaya-tingkatkan-produksi-sawit-di-2025/>.
- Global Reporting Initiative (GRI). (2018). GRI 403: Occupational Health and Safety 2018. <https://www.globalreporting.org/standards/media/1910/gri-403-occupational-health-and-safety-2018.pdf>
- Global Reporting Initiative. (2021). GRI universal standards 2021. GRI Standards. <https://www.globalreporting.org/standards/>.
- Global Reporting Initiative. (2022). GRI 13: Agriculture, Aquaculture and Fishing Sectors 2022.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting & accountability: Changes and challenges in corporate social and environmental reporting*. Prentice Hall Europe.
- Gunawan, J., Permatasari, P., & Fauzi, H. (2022). The evolution of sustainability reporting practices in Indonesia. *Journal of Cleaner Production*, 358, 131798. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131798>.
- Hąbek, P., & Wolniak, R. (2016). Assessing the quality of corporate social responsibility reports: The case of reporting practices in selected European Union member states. *Quality & Quantity*, 50(1), 399–420. <https://doi.org/10.1007/s11135-014-0155-z>.
- Hämäläinen, P., Saarela, K. L., & Takala, J. (2009). Global trend according to estimated number of occupational accidents and fatal work-related diseases at region and country level. *Journal of Safety Research*, 40(2), 125–139. <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2008.12.010>.
- International Finance Corporation. (2012). *Performance standards on environmental and social sustainability*. World Bank Group. <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/ifc-performance-standards.pdf>.
- International Labour Organization. (2019). *Safety and health at the heart of the future of work: Building on 100 years of experience*. ILO. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/wcms_687610.pdf.
- International Labour Organization. (2021). *World employment and social outlook: Trends 2021*. International Labour Office. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_795453.pdf.

- International Organization for Standardization. (2018). ISO 45001:2018 — Occupational health and safety management systems: Requirements with guidance for use. <https://www.iso.org/standard/63787.html>.
- International Sustainability Standards Board. (2023). IFRS sustainability disclosure standards. ISSB. <https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/>.
- Ioannou, I., & Serafeim, G. (2017). The consequences of mandatory corporate sustainability reporting. Harvard Business School Working Paper, 11-100. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1799589>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker). (2025). Data kecelakaan kerja Indonesia tahun 2024. Kemnaker RI. <https://data.go.id/dataset/dataset/kasus-kecelakaan-kerja-tahun-2024>.
- Kementerian Pertanian RI. (2020). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Jakarta: Kementan.
- Khuong, N. V., Herdianti, F. R., & Anh, L. H. T. (2022). The influence of corporate social responsibility disclosures on investment efficiency in the Asian emerging markets. *The Indonesian Capital Market Review*, 14(2), 92–102. <https://scholarhub.ui.ac.id/icmr/vol14/iss2/2>.
- Koskela, M. (2014). Occupational health and safety in corporate social responsibility reports. *Safety Science*, 68, 294–308. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2014.04.011>.
- Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159–174. <https://doi.org/10.2307/2529310>.
- Limaho, H., Sugiarto, Pramono, R., & Christiawan, R. (2022). The need for global green marketing for the palm oil industry in Indonesia. *Sustainability*, 14(14), 8621. <https://doi.org/10.3390/su14148621>.
- Lindblom, C. K. (1994). The implications of organizational legitimacy for corporate social performance and disclosure. Paper presented at the Critical Perspectives on Accounting Conference, New York.
- Lyon, T. P., & Maxwell, J. W. (2011). Greenwash: Corporate environmental disclosure under threat of audit. *Journal of Economics & Management Strategy*, 20(1), 3–41. <https://doi.org/10.1111/j.1530-9134.2010.00282.x>.
- Mariappanadar, S., et al. (2022). Is it a sententious claim? An examination of the quality of occupational health, safety and well-being disclosures in global reporting initiative reports across industries and countries. *International Business Review*, 31, 101922. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2021.101922>.
- McKinsey & Company. (2020). The ESG premium: New perspectives on value and performance. McKinsey & Company Insights. <https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/the-esg-premium-new-perspectives-on-value-and-performance>.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <https://doi.org/10.1086/226550>.
- Milne, M. J., & Gray, R. (2013). W(h)ither ecology? The triple bottom line, the global reporting initiative, and corporate sustainability reporting. *Journal of Business Ethics*, 118(1), 13–29. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1543-8>.

- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience. *Academy of Management Review*, 22(4), 853-886. <https://doi.org/10.2307/259247>.
- Mnif, W., et al. (2021). Reproductive health risks associated with occupational and environmental exposure to pesticides. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(12), 6576. <https://doi.org/10.3390/ijerph18126576>.
- Myzabella, N., et al. (2019). Occupational health and safety in the palm oil industry: A systematic review. *International Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 10(4), 159-173. <https://doi.org/10.15171/ijoem.2019.1576>.
- Ng, Y. G., et al. (2015). Risk factors of musculoskeletal disorders among oil palm fruit harvesters during early harvesting stage. *Annals of Agricultural and Environmental Medicine*, 22(2), 286–292. <https://doi.org/10.5604/12321966.1152101>.
- O'Donovan, G. (2002). Environmental disclosures in the annual report: Extending the applicability and predictive power of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 344–371. <https://doi.org/10.1108/09513570210435870>.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. <https://www.ojk.go.id>.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan. <https://www.ojk.go.id>.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62–77. <https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value>.
- Rasasoran, D. R., Atil, A., Jeffree, M. S., Saupin, S., & Lukman, K. A. (2021). Hearing loss and associated factors among noise-exposed workers in palm oil mills. *Risk Management and Healthcare Policy*, 14, 3653–3658. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S319858>.